

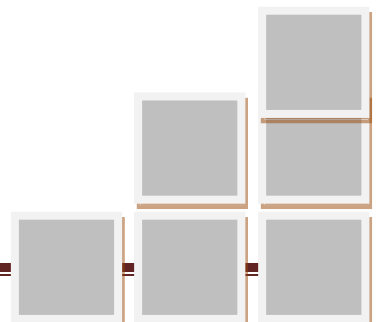


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

KANTOR CAMAT KEDURANG

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2026



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk

mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki, Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan i mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

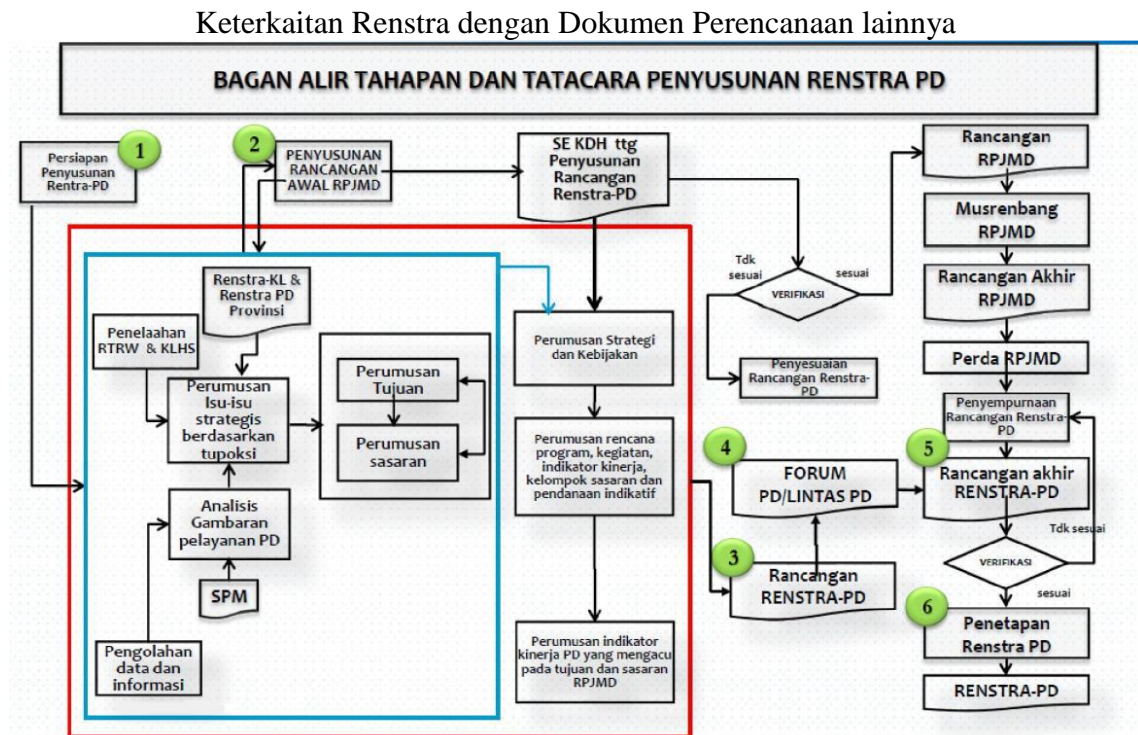
Fungsi rencana strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi

bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Badan 1



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpendoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Kecamatan Kedurang dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf kecamatan Kedurang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedurang dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kedurang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kedurang dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedurang pada tahun 2025-2029;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEDURANG,, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STARATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. **Gambaran Pelayanan Kecamatan Kedurang**
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kedurang
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kedurang
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kedurang
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Lainnya
- 2.2. **Permasalahan Dan Isu-Isu Starategis Perangkat Daerah**

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kedurang
- 3.2. Sasaran Renstra Jangka Menengah Kecamatan Kedurang

3.3. Strategi Renstra Kecamatan Kedurang

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Kedurang

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kedurang

Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Bupati. Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bengkulu Selatan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan perangkat kecamatan di lingkungan pemerintahan kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Sejalan dengan telah berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor: 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091).

Sebagai salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kecamatan Kedurang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dikecamatan sesuai dengan tupoksinya yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat .

Program kerja memberikan arahan pelaksana/aparatur agar dalam melaksanakan tugas penting dikantor kecamatan berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan Kelurahan
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Atasan.

Struktur organisasi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu selatan terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu : Camat
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris camat yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kedurang

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2	Pembina	IV/A	1
3	Penata Tingkat I	III/D	5
4	Penata	III/C	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/B	3
6	Penata Muda	III/A	1
7	Pengatur Muda	II/A	1
8	Diplomat	V	1
JUMLAH			15

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	3
2.	Strata 1 (S 1)	8
3.	Diploma 3 (D 3)	1
4.	SLTA / SMK	3
Jumlah		15

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan strata 8 (S1) dan SLTA sama berjumlah masing- masing 4 orang. Disini ditunjukkan bahwa jumlah sumber daya dikecamatan Kedurang masih sangat kurang dan terbatas.

3. Sumber Daya Aset/Modal

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	Alat-alat Angkutan	5	
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	140.000.000
	- Sepeda Motor	4	47.872.000
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Filling besi/Metal	7	5.750.000
	- Lemari kayu	6	11.700.000
	- Kursi tamu	2	5.600.000
	- Kursi Lipat	4	1.800.000
	- Kursi Tangan	5	7.000.000
	- Kursi Plastik	99	7.185.000
	- Rak Kayu	1	500.000
	- AC Unit	2	11.000.000
	- Lap top	8	58.500.000
	- Printer	7	10.000.000
	- Mesin Ketik Manual Portable	1	2.300.000
	- Meja Biro	5	7.700.000
	- Meja Rapat	1	2.750.000
	- Bangku Tunggu	1	2.400.000
	- Kompor Gas	1	500.000
	- Tabung Gas	1	350.000
	- Televisi	1	2.530.000
	- Sound System	1	4.000.000
	- Dispenser	1	520.000
	- Mesin Absensi	1	4.300.000
	- Kursi Putar	6	15.000.000
	TOTAL	91	349.257.000

Aset Gedung/Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp)
1.	Bangunan gedung kantor	Desa Tanjung Alam	320	1.076.503.000
2.	Rumah negara golongan III	Desa Tanjung Alam	36	79.438.000
	TOTAL			1.155.941.000

Aset Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp)
1.	Tanah Bangunan Kantor	Desa Tanjung Alam Kedurang	320	25.000.000

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedurang

Capaian kinerja Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2029 ditunjukkan melalui Jumlah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan dan penelitian, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses perencanaan pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan .
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Kedurang.
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan.
4. Koordinasi dan ketertiban dinas terkait terhadap peran pembangunan masih kurang.
5. Lebarinya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kedurang adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum/Warga Kecamatan
Individu atau keluarga yang memerlukan layanan administrasi kependudukan (KTP-EL, KK, Akta Kematian, KIA), Surat Keterangan pindah/keluar, Surat Rekomendasi, dan Legalisasi Dokumen.
2. Desa/Kelurahan
Camat Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi di tingkat desa/kelurahan.
3. Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

Memfasilitasi penyusunan perdes/perkades, administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penerapan peraturan. Secara keseluruhan, kelompok sasaran pelayanan kecamatan adalah seluruh elemen masyarakat di Wilayah kerja serta Pemerintahan di bawahnya (desa/kelurahan).

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan penmanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif yang menyatakan bagaimana organisasi membentuk suatu rencana mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencanaa strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedurang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Teknik Menentukan Isu Stategis Kecamatan Kedurang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar (kantor, jaringan internet, dll.)	Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Pelayanan dasar, keterjangkauan akses public	Akselerasi digitalisasi	Reformasi Birokrasi	Kesenjangan wilayah	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di Kecamatan	Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa berkelanjutan	Kebutuhan integrasi layanan	Penguatan Kecamatan	Akses desa perbatasan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
Fungsi pemerintahan umum (ketertiban, pembinaan ideologi, forum warga)	Terbatasnya Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi public Dalam pembangunan	Demokratisasi & transparansi	Pelibatan masyarakat	Keamanan sosial wilayah	Kurangnya partisipasi dan literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan
Posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan Negara	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Ketahanan sosial-ekonomi wilayah Perbatasan	Stabilitas geopolitik	Ketahanan Wilayah	Ketimpangan infrastruktur	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kedurang 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kedurang Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

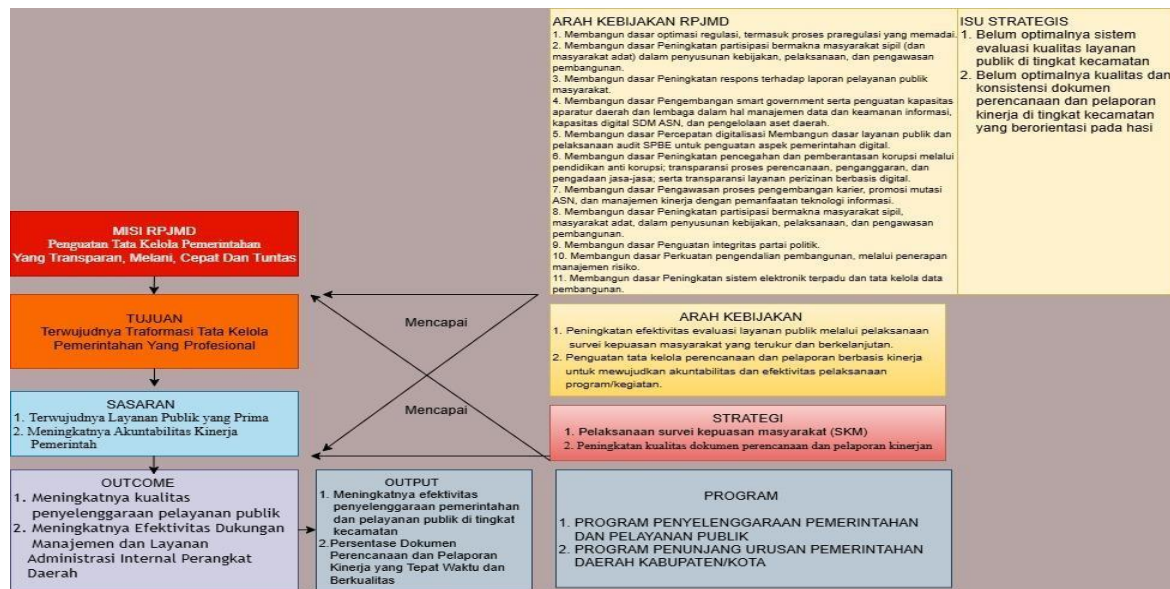
Kecamatan Kedurang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: “MASYARAKAT YANG MADANI”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedurang, dalam hal ini Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kedurang 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kedurang menetapkan sasaran strategi **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan”**.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kedurang tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Kedurang



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Kedurang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya: Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

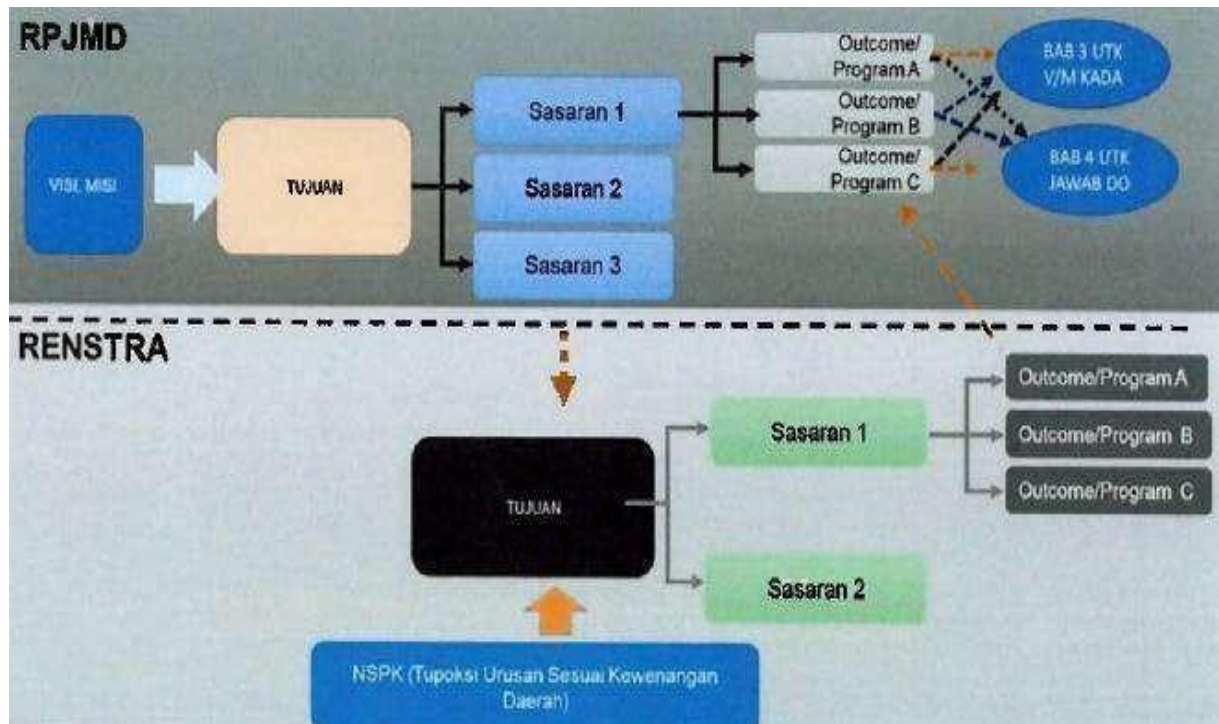
1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedurang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas Pelayanan pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	90	90	95	95	
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)									
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85	85	90	90	95	95	
			Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
1	2	3	4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	11
			Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100	100	100	100	100	100	

			publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.							
			Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.		100	100	100	100	100	
			Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100	100	
			Persentase Desa /Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Nilai SAKIP							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP							
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Kedurang 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan

antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Kedurang sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Kedurang :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Penahapan Renstra Kecamatan Kedurang dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Kecamatan Kedurang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar program/kegiatan	Penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan	Pelaksanaan program prioritas berdasarkan zonasi wilayah	Evaluasi capaian per wilayah terhadap target pembangunan	Replikasi pendekatan kewilayahan secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan/desa
Identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan	Integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah dalam forum Musrenbang	Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD, e-Planning, GIS)	Penyesuaian intervensi kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi	Penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen
Penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan public	Penyusunan kebijakan/program dengan pola intervensi wilayah	Pemantauan dan pelaporan realisasi program secara spasial dan tematik	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pendukung evaluasi spasial	Penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan wilayah
Penguatan SDM perencana dan pengelola data wilayah				

3.4 Arah Dan Kebijakan Renstra Kecamatan Kedurang 2025- 2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kedurang sebagai berikut :

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kedurang

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program lintas sektor di wilayah yang tidak memiliki OPD teknis.	Memperkuat peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan yang responsif.	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan untuk mempercepat pelayanan dan koordinasi pemerintahan di wilayah.	Peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan desa, dan pelaksanaan pemerintahan umum sesuai kewenangan yang dilimpahkan.	

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kedurang

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Kedurang di bawah ini :

GAMBAR 4.1
CASCADING KECAMATAN KEDURANG

a. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kedurang ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kedurang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai

perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

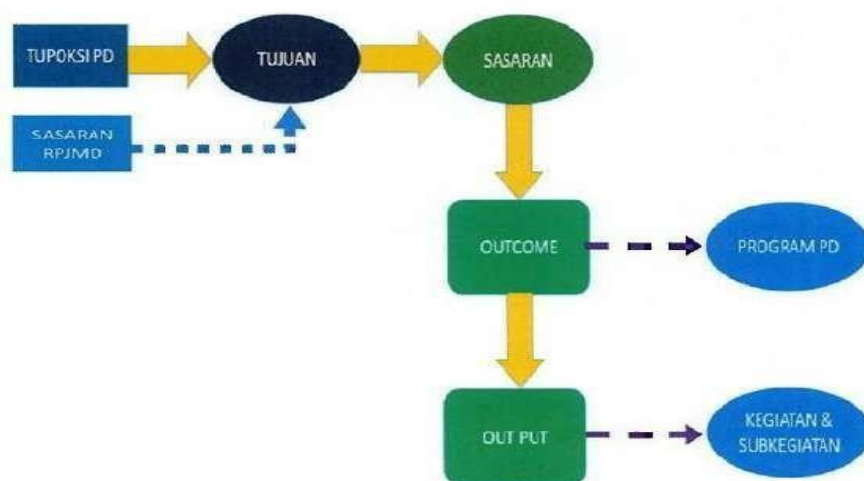
b. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kedurang adalah sebagai berikut

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kedurang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kedurang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kedurang serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kedurang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
 Renstra Kedurang



Tabel 4.2
 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kedurang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					Nilai Sakip		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip		
			Meningkatnya Efektivitas Dukungan Manajemen dan Layanan Administrasi Internal Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
--	--	--	--	---	--	--	--

					Kinerja Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Honorarium	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Hasil Koordinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administ Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan	

				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	Fungsi	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				SKPD	i dan Konsultasi SKPD		
						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
				Terjaminnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
				Tersusunnya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi dan rekomendasi kebijakan pemerintahan tingkat kecamatan yang digunakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

					terka it.		
				terkoordinasiny a pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyaraka t di Wilayah Kecamata n	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerint ahan Non- OPD yang Ditangani Kecamat an	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamat an	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningka tan Efektifita s Pelaksan aan Pelayana n kepada Masyara kat di	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

					Wilayah Kecamatan		
						Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				terwujudnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	

				Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

					anan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam proses pencairan Dana Desa dan ADD	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Tersusunnya Peraturan desa dan Peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terfasilitasinya pembinaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pengadministrasian Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				terfasilitasinya penyelenggaraan trantibum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					n dan Ketertiban Umum		
				Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

a. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kedurang

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kedurang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Kedurang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder .

Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga perencanaan pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Kecamatan Kedurang yang profesional.
2. Terjalinnnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

CAMAT KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

INBIMA KASIRI, S.Pt, M.Ling
NIP. 19821021 200901 1 007

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan rencana strategis (renstra) kantor camat Kedurang menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pembangunan ditingkat kecamatan Kedurang untuk mendukung kegiatan pembangunan di kabupaten Bengkulu Selatan

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kedurang, 09 Januari 2025

CAMAT KEDURANG

Kabupaten Bengkulu Selatan

INBIMA KASIRI, S.Pt, M.Ling
NIP. 19821021 200901 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN	8
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kedurang	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan	8
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kedurang	11
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kedurang	13
2.1.4 Kelompok Sasaran Lainnya	17
2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kedurang	21
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kedurang	23
3.3. Strategi Renstra Kecamatan Kedurang	24
3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Kedurang	25
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
BAB V PENUTUP	37

CASCADING KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025

NO	RPJMD (KEPALA DAERAH)					ESELON II				ESELON III				ESELON IV					
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran sub Kegiatan		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, transparan, dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan		
											Terselenggaranya Urusan Umum dan kepegawaian	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatkan pelayanan administrasi sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	TGR 0 dan Penyelesaian Temuan Administrasi 100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersalurkannya gaji dan Tunjangan ASN		
																Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	terpenuhinya kebutuhan honorarium ASN dan NON ASN		
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
																Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kepegawaian ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
																Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik		
																Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya kebutuhan logistik																		

Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Buku RKA, DPA, RENJA, RENSTRA	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Buku LAKIP, LPPD	Kaubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah ASN Penerima gaji & tunjangan lainnya	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
jumlah penerima honorarium	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan TUSI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penerangan bangunan kantor yang baik	KASUBAG UMUM
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KASUBAG UMUM
jumlah stok kebutuhan logistik	KASUBAG UMUM

jumlah barang penggunaan & cetakan yang tersedia	KASUBAG UMUM
Informasi dan berita-berita yang baru bagi ASN	KASUBAG UMUM
Jumlah Laporan	KASUBAG UMUM
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan luar daerah	KASUBAG UMUM
Gedung kantor atau bangunan lainnya terawat dengan baik	KASUBAG UMUM
Jumlah rekening yang dibayarkan	KASUBAG UMUM
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KASUBAG UMUM
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KASUBAG UMUM
Jumlah Kendaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	KASUBAG UMUM
Jumlah Gedung Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KASUBAG UMUM

Survey	Kasi Pemerintahan
Survey	Kasi Pemerintahan
Survey	Kasi Pemerintahan
jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	KASI PELAYANAN UMUM
jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bertasipasi dalam Forum Musrenbang di desa	Kasi PMD
Jumlah Masyarakat yang baik dan mandiri di desa	kasi PMD

jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kasi kesra
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan	Kasi Trantib
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kasi Trantib
Jumlah Orang yang Mengikuti	Kasi Trantib
Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kasi PMD

Jumlah desa yang di fasilitasi	Kasi Pemerintahan
APBDes yang Transferan dan tepat waktu	Kasi PMD
Jumlah desa/kelurahan yang aman dan tertib	Kasi Trantib
Ide yang dirampung dalam pembangunan	Kasi PMD

5000000

5025000

5050125

5075375.625

5100752.503

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.081.871.000,00		2.092.280.000,00		2.102.741.000,00		2.113.255.000,00		2.123.821.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.963.371.000,00		1.973.188.000,00		1.982.977.000,00		1.992.896.000,00		2.002.865.000,00		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	77	79	1.963.371.000,00	80	1.973.188.000,00	81	1.982.977.000,00	82	1.992.896.000,00	83	2.002.865.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kedurang	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.045.000,00		9.090.000,00		9.135.000,00		9.180.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	9.000.000,00	4	9.045.000,00	4	9.090.000,00	4	9.135.000,00	4	9.180.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	5.000.000,00	4	5.025.000,00	4	5.050.000,00	4	5.075.000,00	4	5.100.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000,00		4.020.000,00		4.040.000,00		4.060.000,00		4.080.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4.000.000,00	2	4.020.000,00	2	4.040.000,00	2	4.060.000,00	2	4.080.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.694.371.000,00		1.702.842.000,00		1.711.288.000,00		1.719.857.000,00		1.728.508.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16	1.694.371.000,00	16	1.702.842.000,00	16	1.711.288.000,00	16	1.719.857.000,00	16	1.728.508.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.593.371.000,00		1.601.337.000,00		1.609.343.000,00		1.617.389.000,00		1.625.475.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16	1.593.371.000,00	16	1.601.337.000,00	16	1.609.343.000,00	16	1.617.389.000,00	16	1.625.475.000,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				98.000.000,00		98.490.000,00		98.915.000,00		99.423.000,00		99.973.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3	98.000.000,00	3	98.490.000,00	3	98.915.000,00	3	99.423.000,00	3	99.973.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000,00		3.015.000,00		3.030.000,00		3.045.000,00		3.060.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	3.015.000,00	12	3.030.000,00	12	3.045.000,00	12	3.060.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.000.000,00		17.085.000,00		17.170.000,00		17.254.000,00		17.341.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	17.000.000,00	2	17.085.000,00	2	17.170.000,00	2	17.254.000,00	2	17.341.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17.000.000,00		17.085.000,00		17.170.000,00		17.254.000,00		17.341.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	17.000.000,00	2	17.085.000,00	2	17.170.000,00	2	17.254.000,00	2	17.341.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.500.000,00		131.150.000,00		131.804.000,00		132.459.000,00		133.077.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	130.500.000,00	2	131.150.000,00	2	131.804.000,00	2	132.459.000,00	2	133.077.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	350		350		350		350		350			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.030.000,00		6.060.000,00		6.090.000,00		6.120.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000,00	1	6.030.000,00	1	6.060.000,00	1	6.090.000,00	1	6.120.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.526.000,00		35.703.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	35.000.000,00	3	35.175.000,00	3	35.350.000,00	3	35.526.000,00	3	35.703.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.526.000,00		35.703.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	35.000.000,00	5	35.175.000,00	5	35.350.000,00	5	35.526.000,00	5	35.703.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.500.000,00		6.530.000,00		6.564.000,00		6.596.000,00		6.628.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	6.500.000,00	2	6.530.000,00	2	6.564.000,00	2	6.596.000,00	2	6.628.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.015.000,00		3.030.000,00		3.045.000,00		3.060.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.000.000,00	2	3.015.000,00	2	3.030.000,00	2	3.045.000,00	2	3.060.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	10.050.000,00	4	10.100.000,00	4	10.150.000,00	4	10.200.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.526.000,00		35.663.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	350	35.000.000,00	350	35.175.000,00	350	35.350.000,00	350	35.526.000,00	350	35.663.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.526.000,00		35.703.000,00		
Terjaminnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	35.000.000,00	2	35.175.000,00	2	35.350.000,00	2	35.526.000,00	2	35.703.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.526.000,00		35.703.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	35.000.000,00	2	35.175.000,00	2	35.350.000,00	2	35.526.000,00	2	35.703.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.500.000,00		12.566.000,00		12.624.000,00		12.686.000,00		12.748.000,00		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	12.500.000,00	2	12.566.000,00	2	12.624.000,00	2	12.686.000,00	2	12.748.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.000.000,00		8.040.000,00		8.080.000,00		8.120.000,00		8.160.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	8.000.000,00	12	8.040.000,00	12	8.080.000,00	12	8.120.000,00	12	8.160.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000,00		2.010.000,00		2.020.000,00		2.030.000,00		2.040.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	2.000.000,00	3	2.010.000,00	3	2.020.000,00	3	2.030.000,00	3	2.040.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.500.000,00		2.516.000,00		2.524.000,00		2.536.000,00		2.548.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2.500.000,00	2	2.516.000,00	2	2.524.000,00	2	2.536.000,00	2	2.548.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.000.000,00		65.325.000,00		65.651.000,00		65.979.000,00		66.308.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	65.000.000,00	2	65.325.000,00	2	65.651.000,00	2	65.979.000,00	2	66.308.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000,00		40.200.000,00		40.401.000,00		40.603.000,00		40.806.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	40.000.000,00	2	40.200.000,00	2	40.401.000,00	2	40.603.000,00	2	40.806.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.125.000,00		25.250.000,00		25.376.000,00		25.502.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	25.000.000,00	2	25.125.000,00	2	25.250.000,00	2	25.376.000,00	2	25.502.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.527.000,00		35.705.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77	79	35.000.000,00	80	35.175.000,00	81	35.350.000,00	82	35.527.000,00	83	35.705.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kedurang	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	5.000.000,00	3	5.025.000,00	3	5.050.000,00	3	5.075.000,00	3	5.100.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	5.000.000,00	3	5.025.000,00	3	5.050.000,00	3	5.075.000,00	3	5.100.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				25.000.000,00		25.125.000,00		25.250.000,00		25.377.000,00		25.505.000,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.125.000,00	1	25.250.000,00	1	25.377.000,00	1	25.505.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.025.000,00	1	5.050.000,00	1	5.075.000,00	1	5.100.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.302.000,00		20.405.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.302.000,00	1	20.405.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Meningkatkan Kualitas Koordinasi dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	5.025.000,00	2	5.050.000,00	2	5.075.000,00	2	5.100.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	5.025.000,00	2	5.050.000,00	2	5.075.000,00	2	5.100.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				30.000.000,00		30.150.000,00		30.380.000,00		30.531.000,00		30.682.000,00		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75	85	30.000.000,00	85	30.150.000,00	85	30.380.000,00	85	30.531.000,00	85	30.682.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kedurang	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				20.000.000,00		20.100.000,00		20.280.000,00		20.381.000,00		20.482.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	19	19	20.000.000,00	19	20.100.000,00	19	20.280.000,00	19	20.381.000,00	19	20.482.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.000.000,00		12.060.000,00		12.200.000,00		12.261.000,00		12.322.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	19	19	12.000.000,00	19	12.060.000,00	19	12.200.000,00	19	12.261.000,00	19	12.322.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.000.000,00		8.040.000,00		8.080.000,00		8.120.000,00		8.160.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	8.040.000,00	1	8.080.000,00	1	8.120.000,00	1	8.160.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.200.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.050.000,00	1	10.100.000,00	1	10.150.000,00	1	10.200.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.050.000,00	1	10.100.000,00	1	10.150.000,00	1	10.200.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.200.000,00		
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77	79	10.000.000,00	80	10.050.000,00	81	10.100.000,00	82	10.150.000,00	83	10.200.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kedurang	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.200.000,00		
Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.050.000,00	1	10.100.000,00	1	10.150.000,00	1	10.200.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	5.000.000,00	2	5.025.000,00	2	5.050.000,00	2	5.075.000,00	2	5.100.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.025.000,00	1	5.050.000,00	1	5.075.000,00	1	5.100.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				17.000.000,00		17.085.000,00		17.170.000,00		17.255.000,00		17.341.000,00		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77	79	17.000.000,00	80	17.085.000,00	81	17.170.000,00	82	17.255.000,00	85	17.341.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kedurang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.500.000,00		3.517.000,00		3.534.000,00		3.551.000,00		3.568.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	3.500.000,00	2	3.517.000,00	2	3.534.000,00	2	3.551.000,00	2	3.568.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8.000.000,00		8.040.000,00		8.080.000,00		8.120.000,00		8.160.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	8.040.000,00	1	8.080.000,00	1	8.120.000,00	1	8.160.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	5.025.000,00	2	5.050.000,00	2	5.075.000,00	2	5.100.000,00		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	5.025.000,00	2	5.050.000,00	2	5.075.000,00	2	5.100.000,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				5.000.000,00		5.025.000,00		5.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.025.000,00	1	5.050.000,00	1	5.075.000,00	1	5.100.000,00		